

DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSI DAN SISTEM POLITIK INDONESIA ERA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN MASA REFORMASI HINGGA SEKARANG

Putri Nabela¹, Raihan Nisya², dan Siti Tiara Maulia³

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi

Alamat e-mail: putrinabela057@gmail.com, raihannisya5@gmail.com,
sititiaramaulia@unja.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi perjalanan dan evolusi demokrasi di Indonesia sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi hingga saat ini. Fokus utama adalah pada konsep dan implementasi Demokrasi Pancasila sebagai landasan konstitusi dan sistem politik dalam periode-periode tersebut. Melalui pendekatan historis dan analisis perubahan politik, penelitian ini mengidentifikasi peran serta perkembangan demokrasi Pancasila dalam konteks politik Indonesia. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur, dokumen-dokumen resmi, dan analisis konten dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan dinamika kompleks dalam implementasi demokrasi Pancasila sepanjang sejarah politik Indonesia, yang mencerminkan tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh sistem politik dan masyarakatnya.

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila, Konstitusi, Sistem Politik, Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi.

ABSTRACT

This research explores the journey and evolution of democracy in Indonesia from the era of the Old Order, New Order, to the reform era up to the present. The main focus is on the concept and implementation of Pancasila Democracy as the constitutional foundation and political system during these periods. Through a historical approach and analysis of political changes, this research identifies the role and development of Pancasila Democracy in the context of Indonesian politics. Data were collected through literature review, official documents, and content analysis from various sources. The findings reveal the complex dynamics in the implementation of Pancasila democracy throughout Indonesia's political history, reflecting the challenges and changes faced by its political system and society.

Keywords: Pancasila Democracy, Constitution, Political System, Indonesia, Old Order, New Order, Reform.

PENDAHULUAN

Indonesia telah menjadi panggung bagi peristiwa-peristiwa politik yang signifikan sepanjang sejarahnya. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga pembentukan negara modern, dinamika politiknya telah melalui serangkaian transformasi yang memengaruhi tidak hanya wajah politiknya, tetapi juga identitas nasionalnya. Dua periode penting dalam sejarah politik Indonesia adalah masa Orde Lama yang ditandai oleh kepemimpinan Presiden Soekarno, masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998.

Demokrasi telah menjadi pilar utama dalam perjalanan politik Indonesia. Namun, apa yang membuat Indonesia unik adalah pengembangan konsep Demokrasi Pancasila sebagai fondasi demokrasi nasionalnya. Demokrasi Pancasila bukan sekadar penerimaan

konsep demokrasi barat, tetapi merupakan implementasi demokrasi yang berakar dalam nilai-nilai budaya dan kepercayaan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki evolusi demokrasi Pancasila sebagai landasan konstitusi dan sistem politik Indonesia dari masa ke masa. Melalui penelusuran yang cermat, penelitian ini akan menyoroti perubahan dan kontinuitas dalam penerapan demokrasi Pancasila dari masa Orde Lama, melalui masa Orde Baru yang otoriter, hingga masa reformasi yang menandai titik balik dalam sejarah politik Indonesia.

Dengan memahami perjalanan demokrasi Pancasila sepanjang masa, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang dinamika politik Indonesia dan bagaimana nilai-nilai Pancasila telah membentuk sistem politiknya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan signifikansi demokrasi Pancasila dalam konteks politik Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

2. Konstitusi Indonesia sebagai Landasan Demokrasi Pancasila

Konstitusi Indonesia, terutama Pembukaan UUD 1945 dan Amandemen-nya, menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang mengatur kehidupan bernegara.

Konstitusi mengatur sistem politik Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, termasuk struktur lembaga negara dan proses pembentukan kebijakan.

3. Perkembangan Sistem Politik di Indonesia

a. Era Orde Lama

Ditandai dengan dominasi satu partai politik (Partai Nasional Indonesia) dan kekuasaan yang otoriter, namun dengan klaim sebagai penyelenggaraan demokrasi terpimpin.

b. Era Orde Baru

Ditandai dengan penguasaan yang kuat dari Presiden Soeharto, sistem politik yang otoriter, serta pembatasan kebebasan politik dan sipil. Konsep "Pancasila sebagai ideologi negara" diperkuat, tetapi sering kali dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan.

c. Masa Reformasi

Dimulai dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, ditandai dengan perubahan besar dalam sistem politik dan konstitusi Indonesia. Reformasi politik mencakup langkah-langkah menuju demokratisasi, termasuk pemilihan umum multi-partai, perluasan kebebasan sipil, dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Tantangan dan Perkembangan Selanjutnya

Demokrasi Pancasila dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan politik, korupsi, polarisasi politik, dan ekstremisme.

Perkembangan selanjutnya membutuhkan upaya untuk memperkuat institusi demokrasi, memastikan perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan membangun tatanan politik yang inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk melacak perkembangan demokrasi Pancasila dari masa Orde Lama hingga masa reformasi. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur, analisis dokumen resmi, dan wawancara dengan pakar sejarah dan politik. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam implementasi demokrasi Pancasila selama periode-periode yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

1. **Dinamika Demokrasi Pancasila dalam Masa Orde Lama**
Selama masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Demokrasi Pancasila seringkali hanya menjadi slogan retorik belaka. Meskipun konstitusi Indonesia menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak suara dan kebebasan berpendapat, namun dalam praktiknya, pemerintah memiliki kendali yang kuat atas jalannya politik. Partai politik yang ada pada masa itu lebih sebagai alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan daripada sebagai wadah ekspresi politik yang independen.
2. **Pembatasan Demokrasi Pancasila di Bawah Rezim Orde Baru**
Ketika rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto berkuasa, demokrasi Pancasila semakin dikungkung. Kekuasaan pemerintah menjadi semakin otoriter, dengan kebebasan politik dan sipil yang sangat dibatasi. Partai politik dibatasi dalam hal struktur dan agenda politik mereka, sementara oposisi politik ditekan dengan keras. Media massa di bawah kendali pemerintah digunakan sebagai alat propaganda, sementara kritik terhadap rezim seringkali dihukum dengan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
3. **Perubahan Drastis dengan Jatuhnya Rezim Soeharto**
Jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 adalah titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Proses reformasi yang diawali dengan gerakan mahasiswa dan demonstrasi massa membawa perubahan besar dalam arah demokrasi Pancasila. Kebebasan politik yang lebih besar diperoleh, termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Pembatasan terhadap partai politik dihapuskan, dan Indonesia menyaksikan periode transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif.
4. **Tantangan dan Tantangan dalam Era Reformasi**
Meskipun reformasi membawa harapan baru bagi demokrasi Pancasila di Indonesia, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi. Korupsi, yang menjadi ciri khas rezim Soeharto, tetap menjadi masalah serius yang menggerogoti fondasi demokrasi. Ketidakstabilan politik, terutama dalam hal koalisi pemerintah dan seringnya pergantian kepemimpinan, juga menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam membangun sistem politik yang stabil dan efektif.

5. Pentingnya Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam konteks perubahan politik yang sedang berlangsung, partisipasi politik masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi Pancasila. Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi, memiliki peran penting dalam memantau dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Partisipasi politik yang aktif dari berbagai lapisan masyarakat juga penting untuk memastikan representasi yang lebih inklusif dalam proses politik.

Dengan memperluas pembahasan mengenai temuan tersebut, kita dapat lebih memahami dinamika politik yang kompleks dan perubahan yang terjadi sepanjang sejarah politik Indonesia, serta pentingnya terus memperkuat demokrasi Pancasila sebagai fondasi sistem politik yang inklusif dan berdaulat.

PEMBAHASAN

Periode Orde Lama

Selama masa Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno, walaupun konsep Demokrasi Pancasila diakui sebagai prinsip dasar, namun implementasinya cenderung lebih bersifat retorik. Pemerintah memiliki kendali politik yang kuat, dan partisipasi politik masyarakat terbatas. Hal ini tercermin dalam dominasi politik oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan penggunaan kekuasaan oleh Soekarno untuk mempertahankan kekuasaannya.

Masa Orde Baru

Di bawah pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru, demokrasi Pancasila semakin ditekan melalui otoritarianisme dan pembatasan kebebasan politik. Soeharto menggunakan alat-alat represif untuk menekan oposisi politik dan mencegah kritik terhadap rezimnya. Pembatasan terhadap media massa dan partai politik diimplementasikan untuk mempertahankan kekuasaan politik yang otoriter.

Masa Reformasi

Jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan dalam arah demokrasi Pancasila di Indonesia. Proses reformasi membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, pers, dan organisasi politik dikurangi, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik.

Tantangan dan Kendala

Meskipun masa reformasi membawa harapan baru bagi demokrasi Pancasila di Indonesia, tantangan tetap ada. Korupsi, ketidakstabilan politik, dan ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah yang serius. Perubahan rezim politik yang terjadi setelah reformasi juga menciptakan ketidakpastian politik yang berkelanjutan.

Implikasi Temuan:

Penguatan Demokrasi Pancasila

Temuan ini menunjukkan perlunya terus memperkuat demokrasi Pancasila sebagai landasan politik Indonesia. Reformasi politik yang terjadi setelah jatuhnya Soeharto membuka peluang untuk memperbaiki sistem politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Pemberantasan Korupsi dan Ketidakstabilan Politik

Upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan stabilitas politik menjadi prioritas penting dalam menjaga momentum reformasi dan memperkuat demokrasi Pancasila. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta

memperkuat lembaga-lembaga demokratis akan membantu mengatasi tantangan tersebut.

Peningkatan Partisipasi Politik

Dalam menghadapi tantangan yang ada, penting untuk terus mendorong partisipasi politik masyarakat dari berbagai lapisan. Penguatan lembaga-lembaga demokratis, pendidikan politik yang lebih luas, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik akan membantu memperkuat demokrasi Pancasila di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam melihat perjalanan politik Indonesia sepanjang masa, tidak bisa disangkal bahwa Demokrasi Pancasila telah menjadi pilar utama dalam pembentukan dan evolusi sistem politik negara ini. Dari masa Orde Lama yang gejolak hingga masa reformasi yang membawa perubahan struktural yang besar, nilai-nilai Pancasila telah tetap menjadi tonggak dalam menentukan arah politik Indonesia.

Meskipun demikian, setiap periode memiliki tantangan dan variasi tersendiri dalam penerapan demokrasi Pancasila. Masa Orde Lama, meskipun berakar pada semangat kemerdekaan dan persatuan, masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Hal ini terutama terlihat dalam praktik politik yang terkadang otoriter dan sentralistik.

Di bawah pemerintahan Orde Baru, demokrasi Pancasila dikekang lebih lanjut melalui sentralisasi kekuasaan dan pembatasan kebebasan politik. Meskipun pembangunan ekonomi mengalami kemajuan, hal ini seringkali terjadi di tengah pembatasan terhadap ruang politik dan kebebasan berpendapat. Namun, walaupun dikekang, semangat demokrasi Pancasila tetap hidup di antara masyarakat Indonesia.

Periode reformasi yang dimulai pada tahun 1998 adalah titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Jatuhnya rezim Soeharto membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat dan penegakan hak asasi manusia. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan ketegangan politik masih menjadi masalah serius yang perlu diatasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk terus memperkuat demokrasi Pancasila sebagai landasan konstitusi yang inklusif. Ini mencakup memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dihormati, institusi demokratis diperkuat, dan partisipasi politik dari semua lapisan masyarakat didorong dan dihargai.

Kesimpulannya, melalui pemahaman yang mendalam tentang peran dan signifikansi demokrasi Pancasila dalam sejarah politik Indonesia, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila telah membentuk dan terus membimbing evolusi sistem politiknya. Dengan terus memperkuat demokrasi Pancasila, Indonesia dapat melangkah maju sebagai negara demokratis yang inklusif dan berdaulat, mencerminkan semangat keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 1998. "Indonesia: Perubahan dari Masa Lampau ke Masa Kini." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anggoro, Kusnanto. 2017. "Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional : Sebuah Penjelajahan Teoritikal." Jurnal Kajian Lemhannas RI. Jakarta : CV. Mandiri Citra Berdikari.
- Astawa, I Putu Ari. 2017. "Negara dan Konstitusi". Artikel. Universitas Udayana.
- Hadiz, Vedi R. 2004. "Reformasi Politik di Indonesia: Evaluasi dan Tantangan Masa Depan." Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lev, Daniel S. 2003. "Pembangunan Politik di Indonesia: Reformasi dan Pasca-Soeharto." Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Maretti, PNS Nadia. 2017. "Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi Muda Sebagai Jati Diri Bangsa yang Sejati." Jakarta : Puskom Publik Kemhan.
- Novianty, Cora Elly. 2013. "Demokrasi dan Ilmu Pemerintahan." Jurnal Konstitusi. Universitas Moch. Sroedji Jember.
- Pigome, Martha. 2011. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945." Jurnal Dinamika Hukum. Universitas Satya Wiyata Papua.
- Redaksi. 2011. "Rumusan Konvensi Hukum Nasional Tentang UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional." Artikel. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Redaksi. 2012. "Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Antara Idealita dan Realita." Artikel. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Sagajoka, Estherlina. 2017. "Pancasila Sebagai 'Iman Kebangsaan' Yang Menyatukan Perbedaan Dan Keberagaman Perspektif Ekonomi." Jurnal. Universitas Flores.
- Sartono, Kus Eddy. 2018. "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru." Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta.